



Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Pemberdayaan Bum Desa Dari Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Kediri

Diana Putri Wahyudi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: 22041010035@student.upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online February 03, 2025

Kata Kunci:

Implementasi; BKK; Pemberdayaan BUM Desa

Keywords:

Implementation; BKK; Empowerment of BUM Desa



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah meluncurkan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa, yang berupa penyertaan modal untuk pengembangan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa. Di Kabupaten Kediri, terdapat 6 desa yang menerima bantuan modal ini untuk pengembangan BUM Desa. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memberikan tambahan modal bagi pengembangan BUM Desa, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa. Hal ini dilakukan karena banyak BUM Desa di Kabupaten Kediri yang masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola unit usahanya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan kajian literatur yang relevan. Melalui teknik tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, digunakan teori dari

Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUM Desa untuk mengelola unit usaha secara maksimal, serta banyaknya aturan dalam pelaksanaan program yang membuat pengurus BUM Desa merasa kesulitan, terutama dalam hal pengadministrasian.

ABSTRACT

The East Java Provincial Government through the Community and Village Empowerment Service has launched the Special Financial Assistance (BKK) Village Program for the Empowerment of Village-Owned Enterprises (BUM Desa), which is in the form of capital participation for the development of business units managed by BUM Desa. In Kediri Regency, there are 6 villages that receive this capital assistance for the development of BUM Desa. This program aims to encourage village economic growth, provide additional capital for the development of BUM Desa, and increase the institutional capacity of BUM Desa. This is done because many BUM Desa in Kediri Regency still lack adequate human resources to manage their business units optimally. This study aims to determine the implementation of the special village financial assistance program for the empowerment of BUM Desa in Kediri Regency. Data collection techniques used in this study include interviews and relevant literature reviews. Through these techniques, this study can identify supporting and inhibiting factors for program implementation. In this study, the theory of Van Meter and Van Horn (1975) was used, which includes six variables, namely standards and targets, resources, characteristics of implementing organizations, inter-

organizational communication, implementing attitudes, and the social, economic, and political environment. The results of the study indicate that the implementation of the special village financial assistance program for empowering BUM Desa in Kediri Regency is still not optimal. This is due to the limited human resources owned by BUM Desa to manage business units optimally, as well as the many rules in implementing the program that make BUM Desa administrators feel difficult, especially in terms of administration.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seperti rendahnya pendidikan dan rendahnya pendapatan masyarakat. Pendidikan sangatlah penting untuk menunjang sumberdaya manusia yang memadai tetapi masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal itu khususnya masyarakat yang ada di pedesaan, rendahnya tingkat pendidikan akan memiliki dampak yang buruk seperti kasus pengangguran meningkat dan dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah. Pemberian bantuan untuk masyarakat ataupun pemerintahan desa bukanlah suatu hal baru di indoneisa beragam skema bantuan telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi kesejahteraan (Noerkaisar, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan beberapa Upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program yang telah dilakukan, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk mempercepat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing yang kuat (Widiasa et al., 2023). Melihat rendahnya pendapatan masyarakat desa pemerintah berupaya membuat program pemberdayaan masyarakat untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi. pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan serangkaian kegiatan tindakan sosial untuk memperkuat dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, pemberdayaan dapat menjangkau sumber-sumber produktif masyarakat dan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan maupun keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka (Hamid, 2018).

Kebijakan pemerintah yang ditetapkan di berbagai regulasi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki upaya memberikan pedoman dan petunjuk yang jelas untuk pengelolaan keuangan desa, supaya pengelolaan yang diberikan dapat memberikan hasil yang optimal (Sanjaya et al., 2020). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan beberapa upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program yang telah dilakukan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah program bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa, khususnya di Kabupaten Kediri. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga milik desa yang berperan dalam pengembangan ekonomi desa, berbadan hukum, dan dikelola secara mandiri oleh desa. BUM Desa didirikan bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang dapat memberikan pendapatan asli desa, memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUM Desa adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola potensi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sumber daya desa agar perekonomian desa dapat berkembang (Karim et al., 2020). Bantuan keuangan khusus diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi desa,

meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa, meningkatkan sarana pengembangan usaha bumdesa dan memberikan stimulus penyertaan modal.

Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan untuk mengupayakan terwujudnya kemandirian desa khususnya di daerah kediri. Dengan adanya BUM Desa ini akan meningkatkan pendapatan asli desa dan memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Lembaga untuk pengembangan ekonomi desa menjadi salah satu program yang dijalankan oleh pihak desa untuk sarana meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Budiono, 2015). Tetapi BUM Desa memiliki banyak kendala untuk mengembangkan unit usahanya, seperti keterbatasan modal, minimnya sumber daya manusia yang mengelola BUM Desa, kurangnya branding ke masyarakat dan persaingan pasar yang ketat kalah dengan usaha milik pribadi masyarakat. Dengan adanya program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa ini pemerintah berharap dapat mengatasi masalah tersebut dengan tambahan modal yang diberikan ke desa untuk kemajuan BUM Desa dan pemerintah provinsi maupun kabupaten kediri memberikan dukungan teknis maupun fasilitasi.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Palupi (2020), implementasi BUM Desa sangat bergantung pada peran Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program BUM Desa. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) untuk menjalankan program yang mendukung implementasi BUM Desa di wilayah Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah berhasil merealisasikan bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa di 140 BUM Desa yang tersebar di 27 kabupaten, termasuk Kabupaten Kediri. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas BUM Desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di Kabupaten Kediri sendiri terdapat 343 desa, namun hanya 6 desa yang menerima bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022, yang berisi pedoman umum program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pemulihan ekonomi. Peraturan tersebut menetapkan sasaran program untuk desa-desa yang telah terklasifikasi sebagai desa maju atau berkembang berdasarkan data Desa Center Provinsi Jawa Timur. Adapun 6 desa di Kabupaten Kediri yang menerima bantuan tersebut adalah Desa Siman di Kecamatan Kepung, Desa Purwodadi di Kecamatan Ringinrejo, Desa Wonoasri di Kecamatan Grogol, Desa Karangtengah di Kecamatan Kandangan, Desa Sidomulyo di Kecamatan Puncu, dan Desa Blimbing di Kecamatan Mojo.

Dari 6 desa tersebut memiliki kendala masing-masing dalam menjalankan program untuk pengembangan unit usaha karena beberapa hal seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan bumdes dan desa mengalami kesulitan menganalisis belanja yang di butuhkan seperti bedanya belanja barang yang dibutuhkan waktu pengajuan proposal dan realisasi belanja. 6 desa yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan BUM Desa unit usahanya perdagangan. Pada saat pengimplementasian program BKK untuk pemberdayaan bumdesa terjadi kurangnya komunikasi yang baik antara pendamping forum bumdesa provinsi

dengan pihak desa penerima bantuan maupun pihak instansi pemerintahan kabupaten kediri (DPMPD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan keuangan khusus desa yang difokuskan pada pemberdayaan BUM Desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Kediri. Studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), yang dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel bebas yang saling berinteraksi. Variabel-variabel tersebut mencakup standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi serta kegiatan implementasi, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik. Dengan pendekatan teori ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan desa-desa penerima bantuan, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan program pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi desa. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Kediri, melalui pemberdayaan BUM Desa. Sebelum pelaksanaan program pemberdayaan BUM Desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri mengadakan sosialisasi untuk menyebarkan informasi, agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemangku kepentingan dan calon pengurus BUM Desa. Dengan adanya sosialisasi Pemerintah berharap para pelaku kegiatan mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan BUM Desa. Tidak hanya sosialisasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri melakukan orientasi pengelolaan dalam pemberdayaan BUM Desa tujuan diadakan orientasi untuk memberikan pembekalan kepada BUM Desa yang akan mendapatkan bantuan keuangan khusus. Setelah BUM Desa merealisasikan bantuan untuk kemajuan unit usahanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri memiliki tanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke BUM Desa yang mendapatkan bantuan untuk mengetahui bagaimana realisasi bantuan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Bagian ini menguraikan tujuan program, faktor-faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri.

Tujuan dari Program BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa adalah sebagai berikut:

1. Mendukung percepatan pemulihan ekonomi di tingkat desa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan BUM Desa.
3. Meningkatkan fasilitas untuk pengembangan usaha BUM Desa.
4. Memberikan dorongan kepada pemerintah desa dan BUM Desa dalam menciptakan inovasi serta mengembangkan usaha BUM Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri.

Pelaksanaan program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini antara lain: a) Kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan DPMPD Kabupaten Kediri. b) DPMD Provinsi Jawa Timur serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri memfasilitasi sosialisasi dan pelayanan administrasi untuk BUM Desa yang menerima bantuan modal dari program. c) DPMPD Provinsi Jawa Timur membantu dalam proses pencairan BKK BUM Desa. d) Memberikan pendampingan melalui bimbingan teknis untuk desa yang menerima bantuan untuk pemberdayaan BUM Desa. e) Pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan BUM Desa.

Adapun faktor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan program menjadi kendala sebagai berikut: a) keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUM Desa di desa yang menerima bantuan. b) sulitnya menganalisis belanja barang yang dibutuhkan antara yang di proposal dan realisasi berbeda. c) terlalu banyak aturan sehingga BUM Desa yang mendapatkan bantuan merasa kesulitan dalam hal administrasi. d) kurangnya kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.

Berdasarkan analisis hasil riset untuk memahami bagaimana implementasi program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri, penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Teori ini mencakup beberapa variabel, di antaranya:

Karakteristik pertama Standar dan sasaran Dalam mengimplementasikan program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Kediri yang dibuat harus ada standar dan sasaran yang jelas. Dengan adanya standar implementasi yang jelas seluruh proses penyaluran dana bantuan keuangan khusus akan berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten memastikan bahwa penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan khusus dialokasikan dengan sebaik mungkin dan dapat memberikan dampak pemberdayaan masyarakat ataupun penguatan ekonomi desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sasaran program pemberdayaan BUM Desa, yaitu BUM Desa yang telah berbadan hukum di wilayah Jawa Timur dan terverifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023. Sasaran tersebut mencakup BUM Desa yang diklasifikasikan sebagai maju atau berkembang berdasarkan Data Desa Center (DDC) Provinsi Jawa Timur. Lokasi desa yang menerima bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Bantuan keuangan khusus tersebut digunakan untuk pengembangan usaha tematik yang telah berjalan.

Masyarakat desa juga ikut berpartisipasi dalam proses implementasi dengan adanya partisipasi masyarakat akan mencapai sasaran dari program unit usaha desa, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa akan mengurangi beban pemerintah dalam proses berjalannya unit usaha yang di kelola BUM Desa (Hadiwiyono & Adi Roy Pandang, 2023).

Karakteristik Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia di desa ataupun BUM Desa yang mendapatkan bantuan. sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan implementasi. Pengurus BUM Desa akan mengoptimalkan dan akan melakukan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan skill marketing dan membuat inovasi produk, layanan maupun pemasaran. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia pengurus BUM Desa akan memberikan dampak yang positif seperti membantu BUM Desa dalam menjangkau lebih banyak konsumen, untuk menjaga daya saing BUM Desa dengan menghadirkan produk-produk baru di unit usaha BUM Desa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta membantu BUM Desa tetap relevan di pasar dan terus tumbuh serta berkembang dari waktu ke waktu mengikuti arus pasar yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tepat Kabupaten Kediri dapat memastikan bahwa implementasi program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi desa di kabupaten kediri. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sumber daya pengurus BUM Desa di enam desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa ini masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan ataupun memajukan BUM Desa dengan optimal. Dengan banyaknya peraturan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur membuat pengurus BUM Desa kesulitan dalam hal administrasi. sumber daya pengurus BUM Desa sangatlah mempengaruhi keberhasilan implementasi program bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa.

Karakteristik organisasi pelaksana, Organisasi pelaksana yang bertanggungjawab atas implementasi program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa di kabupaten kediri harus memiliki karakteristik tertentu untuk memastikan keberhasilan suatu tujuan. karakteristik penting yang harus dimiliki antar organisasi pelaksana baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri.

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang BUM Desa. Pihak terkait harus paham tentang regulasi BUM Desa, mampu memberikan fasilitasi terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh penerima bantuan.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh DPMPD Kabupaten Kediri, pihak DPMPD Kabupaten Kediri memberikan fasilitasi untuk BUM Desa sesuai SOP (Standard Operating procedure), standart operasional prosedur yang mendetail untuk setiap tahap implementasi di Kabupaten Kediri mulai dari proses usulan program pemberdayaan BUM Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kediri, melakukan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus desa yang nantinya hasil dari verifikasi di setorkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Pihak pemerintah kabupaten juga memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait pelaksanaan BKK desa program pemberdayaan BUM Desa di Tingkat kabupaten. Karakteristik organisasi pelaksana dari kabupaten kediri harus mempunyai standart operasional yang jelas dan strukrur agar implementasi program berjalan dengan baik.

Pemerintah desa berperan dalam proses implementasi program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa dengan tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka merencanakan kegiatan BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa. Desa juga bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa mengenai tambahan penyertaan modal yang berasal dari bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur. Enam desa penerima bantuan tersebut telah melaksanakan kewajiban ini dengan mengadakan rapat untuk membahas perkembangan dan kemajuan unit usaha yang dijalankan.

Jadi untuk karakteristik organisasi pelaksana yang ada di kabupaten kediri sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak provinsi, pihak-pihak instansi terkait memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri sehingga tidak ada tumpang tindih tugas maupun tanggung jawab.

Sikap pelaksana dalam proses implementasi program bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa harus profesionalisme antara pelaksana satu dengan yang lain. Pelaksana dalam proses implementasi program BKK untuk pemberdayaan BUM Desa ini yaitu mulai dari pemerintah desa, pendamping desa, pemerintah provinsi (DPMD Provinsi Jawa Timur) dan pemerintah kabupaten (DPMPD Kabupaten Kediri). Para pelaksana program juga harus memiliki sikap yang kolaboratif supaya kerja sama dalam berjalannya program BUM Desa dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kesalah fahaman komunikasi. Harus menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak terkait. Pengurus BUM Desa ataupun pihak pemerintah juga harus memprioritaskan masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam Pembangunan ekonomi desa. Di kabupaten kediri sikap pelaksana program sudah professional namun masih kurang inovasi dalam pengembangan BUM Desa untuk memberikan ide-ide terbaru untuk memajukan unit usaha

Komunikasi yang baik antar organisasi terkait adalah kunci keberhasilan suatu program, semakin baik komunikasi atau koordinasi antar organisasi dalam suatu

implementasi, maka lebih cenderung sedikit kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Koordinasi sangat di butuhkan agar pelaksanaan program BUM Desa dapat berjalan, untuk meminimalisir tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder (Fajarwati et al., 2016).

Di Kabupaten Kediri, komunikasi antara pihak BUM Desa, DPMPD Kabupaten Kediri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta forum BUM Desa provinsi berlangsung dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala komunikasi dengan forum BUM Desa Provinsi Jawa Timur karena pihak forum kurang memahami petunjuk teknis terkait bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa. Meski demikian, kendala tersebut berhasil diatasi oleh DPMPD Kabupaten Kediri.

Dalam proses implementasi suatu program lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga ikut terlibat untuk keberhasilan implementasi. Apabila lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak berjalan beriringan maka proses implementasi akan tidak kondusif. Jika dilihat dari segi sosial masyarakat merespon baik dengan adanya program bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa khususnya desa yang mendapatkan bantuan. masyarakat di desa tersebut ikut berpartisipasi dalam implementasi program, 6 desa di kabupaten kediri yang mendapatkan bantuan untuk pemberdayaan BUM Desa kebanyakan unit usahanya perdagangan. Dalam proses pelaksanaan program masyarakat ikut membantu membersihkan dan menata unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Terdapat 1 desa yang bantuannya di gunakan untuk kemajuan taman wisata dengan aadanya bantuan ini wisata di tempat tersebut menjadi ramai di datangi warga karena ada penambahan wahana permainan anak-anak. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam implementasi program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Kediri.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi program BKK desa untuk pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Kediri dilaksanakan secara optimal oleh pihak-pihak terkait, seperti DPMD Provinsi Jawa Timur, DPMPD Kabupaten Kediri, serta BUM Desa yang menerima bantuan keuangan khusus untuk pengembangan BUM Desa di desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebelum merealisasikan program bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan BUM Desa sudah melakukan sosialisasi kepada pihak yang akan mendapatkan bantuan agar program berjalan sesuai tujuan dan terwujudnya prinsip transparansi pelaksanaan program. dan pihak DPMD Provinsi Jawa Timur dengan DPMPD Kabupaten Kediri sudah melaksanakan bimbingan teknis dengan pihak BUM Desa yang mendapatkan bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Saat melaksanakan kegiatan ada beberapa kendala yang terjadi yaitu BUM Desa masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan, banyaknya aturan jadi pihak BUM Desa merasa keberatan dan BUM Desa sulit menganalisis belanja yang akan dibelikan proposal dengan realisasi belanja barang tidak sesuai. oleh karena itu, perlunya koordinasi yang baik antara pihak terkait agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah perlu dilakukan pengembangan kapasitas

sumber daya manusia BUM Desa dilakukan secara rutin, membuat aturan yang mudah dipahami oleh pihak penerima bantuan, sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan secara berkala. Program bantuan keuangan khusus desa untuk pemberdayaan BUM Desa sangat membantu BUM Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan dengan adanya tambahan stimulus penambahan modal untuk BUM Desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Diperlukan kegiatan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk penguatan BUM Desa. Perlu diadakan pengembangan skill pengurus BUM Desa agar mendapatkan pengalaman dan wawasan terkait pengelolaan BUM Desa. Diadakan koordinasi antar pihak terkait secara rutin untuk mengetahui perkembangan BUM Desa dan untuk mengetahui keberlanjutan implementasi program.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Fajarwati, Y., Yusuf, M., & Handayani, R. (2016). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hadiwiyono, H., & Adi Roy Pandang, A. R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial Ekonomi Masyarakat. *Akses : Journal of Publik & Business Administration Science*, 5(2), 40-46. <https://doi.org/10.58535/jasm.v5i2.43>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.
- Karim, N. A., Ilato, R., & Hinelu, R. (2020). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 105-116.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.
- Palupi, A. I. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Bumdes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & ... (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) berdikari melalui implementasi digital marketing system. *CARADDE: Jurnal ...*, 3, 65-75. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/467%0Ah> <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/download/467/314>
- Widiasa, K., Ayu, I., Sri, P., & Astawa, I. W. (2023). *Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus tentang Bali Smart Island di Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng (Evaluation of Special Financial Assistance Policy Regarding Bali Smart Island in Pakraman Village in Buleleng Subdistrict)*. 3(1), 1-8.